

**SKRIPSI**

***DYNAMIC GOVERNANCE : DALAM PENGELOLAAN RUANG  
TERBUKA HIJAU DI KOTA MAKASSAR***

**NINING DEWI ASTUTI**

**Nomor Stambuk : 105640216115**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2019**

***DYNAMIC GOVERNANCE : DALAM PENGELOAAN RUANG TERBUKA***

**HIJAU DI KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

**NINING DEWI ASTUTI**

Nomor Stambuk : 105640216115

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Proposal Penelitian : *Dynamic Governance* : Dalam  
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di  
Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Nining Dewi Astuti

Nomor Stambuk : 105640216115


Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Drs. Ahmaduddin Sidik, M.Pd.

  
Nasrul Haq, S.Sos., MPA

Mengetahui

Dekan  
Fisipol Universitas Makassar

Ketua Jurusan  
Ilmu Pemerintahan

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

  
Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0056/FSP/A.3-VIII/IX/41/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Senin, 30 September 2019.

### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

  
Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Sii

  
(.....)

2. Drs. Alimuddin Said, M.Pd

  
(.....)

3. Hamrun, S.IP, M.Si

  
(.....)

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH


Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nining Dewi Astuti  
Nomor Stambuk : 105610216115  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis/dipublikasikan oleh orang lain atau plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 5 Oktober 2019

Yang menyatakan

  
Nining Dewi Astuti

## ABSTRAK

**NINING DEWI ASTUTI**, Nomor Stambuk 105640216115 menyusun skripsi dengan judul: **“Dynamic Governance: Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar”**.

Pembimbing I Drs. Alimuddin Said, M.Pd

Pembimbing II Nasrul Haq, S.Sos., MPA

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengembangan Kemampuan Tata Kelola Dinamis (*Dynamic Governance*) dalam mengoptimalkan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dengan berbagai Stakeholder di Kota Makassar. Penelitian ini adalah tergolong pada jenis penelitian deskriptif, sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Informan pada penelitian ini ialah: Pemerintah Kota Makassar. Pengelola Taman macan (Kecamatan Ujung Pandang). Brigade Taman (Pengelola Taman macan). Masyarakat Kota Menetap (Masyarakat Ilmiah/Perguruan Tinggi, Masyarakat umum Kota Menetap). Jumlah keseluruhan informan pada penelitian ini sebanyak 8, dengan klasifikasi sebagai berikut : 8 orang sebagai informan Kunci. Data-data penelitian diperoleh dari berbagai sumber data guna menjawab permasalahan penelitian, yaitu : data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara. Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Langkah pengolahan data adalah sebagai berikut: Data yang didapat dari observasi di kumpulkan, dan kelompokkan, selanjutnya identifikasi dan akhirnya disimpulkan berupa hasil potensi dan permasalahan. Untuk data yang didapat dari wawancara berupa rekaman wawancara, dinarasikan dan diedit supaya mendapatkan tata kalimat yang baik dan benar. Narafikasi dari hasil wawancara dianalisa berdasarkan teori dan konsep yang ada, dan selanjutnya disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan ruang terbuka hijau di kota makassar belum baik karena pohon-pohon yang ada ditaman macan sangat gersang dan tanahnya tidak ditanami oleh rumput lalu banyak pohon-pohon yang kurang terawat, sarana dan prasarana yang ada di dalam taman belum tersedia dan kurangnya sumber daya manusia dan jumlah personel pengelola taman disetiap taman jadi pemeliharaan dan kebersihan yang ada didalam taman tidak bersih atau kurang bersih.

**Kata kunci : *Dynamic Governance*, Pengelolaan, Ruang Terbuka Hijau**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena limpahan Rahmat dan Karunia-Nya skripsi yang berjudul “*Dynamic Governance: Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar*” dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan suatu nikmat yang tiada ternilai dalam pelaksanaan penelitian skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, walau sedikit mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat kerja keras penulis dan adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Tetta Muh.Natsir dan Mama Nurhayati yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudarku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak selaku pembimbing I Drs. Alimuddin Said, M.Pd. yang sangat baik dalam membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA, selaku pembimbing II yang sangat baik dalam membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku sekertaris Jurusan Ilmu Pemerintahan.
5. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Seluruh civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Kedua orang tua (Muh.Natsir&Nurhayati) atas perhatian, kasih sayang, doa dan dukungan yang diberikan.
8. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
9. Tim Pengelola Taman Macan, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Ujung Pandang, Brigade Taman dan masyarakat bekerja sama selama penulis



melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

10. Kakak Briptu Muh.Nirwan yang selalu mendukung, serta materiil yang diberikan, menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Seluruh saudara angkatan 2015 khusus kelas VIII.B & VIII.C Ilmu Pemerintahan. Teman-teman KKP Bulukumba angkatan ke-XVII Fisipol Unismuh Makassar yang telah menjadi keluarga bagi penulis.

Terlalu banyak orang yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga tidak akan muat bila dicantumkan dan dituturkan semuanya dalam ruang yang terbatas ini, kepada mereka semua tanpa terkecuali penulis ucapkan terima kasih yang teramat dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Akhirnya tak ada gading yang tak retak, tak ada ilmu yang memiliki kebenaran mutlak, tak ada kekuatan dan kesempurnaan, semuanya hanya milik Allah SWT, karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan dan perbaikan skripsi ini senantiasa dinantikan dengan penuh keterbukaan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar,30 September 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Pengajuan Skripsi.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....</b>	<b>iv</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Konsep <i>Dynamic Governance</i> (pemerintahan dinamis) .....	7
B. Ruang Terbuka Hijau.....	11
C. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau .....	14
D. Kerangka Pikir .....	21
E. Fokus Penelitian.....	22
F. Deskripsi Fokus Penelitian .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	26
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	26
C. Sumber Data.....	26
D. Informan Penelitian.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Pengabsahan Data .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	32

B. Gambaran Umum Keadaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar .....	35
C. Tata Kelola Pemerintah dalam Pengelolaan Taman Macan .....	40
D. <i>Dynamic Governance</i> Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau .....	
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>74</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Sarana Penunjang Pemeliharaan Taman .....	39
Tabel 4.2 Personil Bidang Pertamanan .....	40
Tabel 4.3 Taman Di Kec. Ujung Pandang .....	51
Tabel 4.4 Pengelolaan Taman .....	56



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Organisasi dan lingkungannya merupakan satu paket kesatuan yang saling melekat dan terhubung, karena organisasi merupakan suatu sistem yang sifatnya terbuka. Maka dari itu, melihat sisi bernegara hari ini, pemerintah dengan segala kapasitasnya dituntut harus mampu menjawab keresahan yang diakibatkan oleh pergeseran pola perilaku masyarakat global. Seperti perubahan ekspektasi masyarakat sebagai konsumen yang harus diimbangi dengan inovasi, perbaikan produk dan jasa, penentuan kebijakan pemerintah guna menciptakan lapangan pekerjaan dan sebagainya.

Upaya merealisasikan produk kebijakan tentu bukanlah perkara mudah. Apalagi terkait dengan kebijakan yang mesti diputuskan ditengah-tengah ketidakpastian dan perubahan yang tiada hentinya berlangsung. Pemerintah harus cerdas, memikirkan solusi yang tepat melalui pembelajaran organisasi secara terus menerus. Jika tidak, bukan tidak mungkin negara akan mengalami peluruhan secara berangsur-angsur, karena gagal mengeksekusi kebijakan adaptif.

Pemerintahan dinamis (*dynamic governance*) berusaha mengubah haluan organisasi yang memungkinkan kita dapat terus berpacu di tengah jalan mulus. Menjadikan lingkungan sebagai kawan yang senantiasa dapat mendatangkan berbagai keuntungan. Neo dan Chen (2007) dalam buku berjudul *dynamic governance* juga menegaskan bahwa *dynamic governance* adalah sebuah konsep

yang menekankan bagaimana bekerjanya berbagai kebijakan, institusi dan struktur yang telah disusun agar mampu beradaptasi dengan kondisi ketidakpastian dan perubahan sehingga dapat tetap relevan dan efektif untuk mencapai tujuan dan keinginan-keinginan jangka panjang.

Kondisi dinamis pemerintah ini ditempuh melalui pembangunan jalur adaptif (*adaptive path*) dan kebijakan adaptif (*adaptive policy*) sehingga menghasilkan kebijakan yang efektif. Jalur adaptif yang dimaksud menekankan pada mekanisme pengambilan keputusan yang tidak berbelit-belit namun tetap berjalan dalam koridor hukum. Sedangkan kebijakan adaptif merupakan sumber dari gagasan dan tindakan yang akan melahirkan sejumlah inovasi pemerintahan dan merupakan kunci penting dalam dinamisasi kebijakan.

Masalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perkotaan saat ini merupakan salah satu masalah yang sulit untuk dipecahkan di Kota-kota besar. Masalah RTH terjadi karena adanya kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, sehingga ruang hijau tersebut cenderung mengalami konversi lahan menjadi kawasan terbangun yang dilakukan tanpa memperhatikan keberadaan lingkungan sekitar. Sebagian besar permukaannya, terutama di pusat kota, tertutup oleh jalan, bangunan dan lain-lain dengan karakter yang sangat kompleks dan berbeda dengan karakter ruang terbuka hijau. Pada umumnya dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup.

Menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik yang ada di perkotaan, baik berupa ruang terbuka hijau (RTH), telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti seringkali terjadi banjir di

perkotaan, tingginya polusi udara, dan meningkatnya kerawanan sosial (kriminalitas dan krisis sosial), menurunnya produktivitas masyarakat akibat stress karena terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial. Dengan kata lain, keberadaan RTH dapat mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan, karena ruang terbuka hijau mempunyai tujuan dan manfaat yang besar bagi keseimbangan, kelangsungan, kesehatan, kelestarian, dan peningkatan kualitas lingkungan itu sendiri. Saat ini pentingnya membangun kota hijau di tengah kota oleh karena itu kebijakan mendasar dan komitmen kuat untuk membangun yang memungkinkan kota berkelanjutan (kota hijau) Nirwono Joga (Hamrun, 2011:3 ).

Perkembangan kawasan perkotaan yang sedemikian cepat harus dibarengi oleh peningkatan kapasitas pemangku kepentingan untuk mempertahankan kualitas lingkungan kehidupan perkotaan. Penyediaan prasarana dan sarana hampir selalu tertinggal oleh perkembangan permasalahan yang terjadi. Kemampuan pengelola perkotaan dalam memahami permasalahan yang timbul dan merumuskan upaya pemecahannya belum juga menunjukkan hasil positif yang mengarah pada perbaikan kualitas lingkungan perkotaan. Saat ini sangat sulit menemukan perkotaan yang perkembangannya diindikasikan oleh hal-hal positif. Perkembangan yang kasat mata dan mudah dikenali justru hal-hal yang tidak semestinya terjadi seperti berkurangnya ruang terbuka hijau, kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas, polusi, serta sifat individualistis masyarakatnya. Perencanaan tata ruang dalam konteks pengalokasian RTH seyogyanya dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan fungsi

budi daya dan fungsi lindung sebagaimana amanat Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Ketidakmampuan menyeimbangkan kedua fungsi tersebut menunjukkan lemahnya komitmen politik tata ruang. Kegagalan politik tata ruang dapat diukur dari kurangnya keinginan untuk membiayai program RTH (*green budgeting* RTH). Berdasarkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro alokasi ruang terbuka hijau suatu kawasan perkotaan adalah 30% dari luas kota.

Pendekatan *governance* membutuhkan *dynamic governance* sebagai bentuk lain pengembangan dalam pemahaman ilmu pemerintahan dan pendekatan administrasi publik modern hal ini membantu melihat permasalahan secara menyeluruh (*holistic*) salah satunya adalah model pembangunan *dynamic governance* di Singapura oleh Neo dan Chen. *dynamic governance* terlaksana jika ada pembelajaran terus menerus untuk menghasilkan dan mengeksekusi kebijakan adaptif (*adaptive policy*) melalui pengembangan *dynamic capabilities* (mencakup kemampuan *thinking ahead, thinking again* dan *thinking across*) pada proses pembangunan *able people* dan *agile process*. Anwar, (Muchlas, 2009). Tulisan ini akan mengeksplorasi bagaimana suatu dinamika dapat diciptakan dalam suatu kebijakan atau program yang dihasilkan institusi pemerintahan daerah baik dari Pemerintah Kota Makassar khususnya atau dibagian lainnya. Eksplorasi tersebut akan menggambarkan bagaimana budaya kelembagaan yang kuat dipadukan dengan kapabilitas dalam menciptakan suatu program atau kebijakan akan menghasilkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Makassar.



Jumlah taman yang ada di Kota Makassar menurut data Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Lapangan Dan Taman Kota Makassar adalah sebanyak 37 Taman. Keseluruhan taman ini tersebar di empat arah mata angin kota. Belum maksimalnya pengelolaan taman merupakan faktor utama pemicu berkurangnya minat masyarakat untuk menggunakan taman. Upaya pemerintah kota makassar dalam hal ini dinas lingkungan hidup kota makassar untuk mengembalikan fungsi taman dan bisa menarik lagi minat masyarakat tentunya sangat diperlukan sebagai penanggung jawab pengelola taman di kota Makassar. Perlu di sadari bahwa dalam pengelolaan taman kota bukan hanya wewenang pemerintah kota makassar saja akan tetapi peran swasta dan pengguna taman juga perlu dilibatkan.

Untuk mewujudkan Pengelolaan Taman Macam secara maksimal tentunya diperlukan peran pemerintah agar membangun relasi dengan Masyarakat dalam pengelolaan Taman di Kota Makassar. Pemerintah kota Makassar harus mampu melakukan upaya-upaya politik untuk mensinergikan semua *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan Taman di Kota Makassar.

Berdasarkan uraian diatas dan berbagai masalah yang ada penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “***Dynamic Governance: Dalam Pengeloan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar***”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana *dynamic governance* dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di kota makassar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan rumusan masalah penelitian yang diungkapkan, di tentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana *dynamic governance* dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di kota makassar ?

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan mendasarkan pada rumusan permasalahan maka, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam hal:

Yang dimaksud dengan kegunaan praktis ini adalah keseluruhan data dan informasi yang disajikan dalam bentuk laporan hasil data penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah kota Makassar dalam bidang pengelolaan Taman Kota, di Kota Makassar.

1. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar.
2. Sebagai salah satu bahan referensi bagi peneliti lainnya yang berminat meneliti masalah-masalah Pengelolaan Taman kota.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep *Dynamic Governance* (Pemerintahan Dinamis)

##### 1. Konsep *Dynamic Governance*

*Dynamic Governance* yang dikenal saat ini merupakan satu kemampuan pemerintah untuk terus menyesuaikan kebijakan dan program publik, serta pola mengubah cara kebijakan publik tersebut dirumuskan dan dilaksanakan, sehingga berdampak pada kepentingan jangka panjang dicapai. Kondisi kedinamisan dalam pemerintahan sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan terutama pada lingkungan yang mengalami ketidakpastian dan perubahan yang cepat dimana masyarakat yang semakin menuntut kecanggihan, lebih berpendidikan, dan lebih terdampak globalisasi serta lahirnya berbagai konsep baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan persaingan global.

Konsep teori *Dynamic Governance* mencerminkan upaya pemimpin yang dengan sengaja untuk membentuk masa depan mereka. Adapun konsep dasar *Dynamic Governance* adalah mengkombinasikan budaya dengan kapabilitas sehingga dapat menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik.

*Dynamic Governance* dari Boon dan Geraldine (Lukman, 2017). Aspek kemampuan pemerintahan dinamis/*dynamic governance* yang terdiri tiga unsur utama, yaitu :

- a. *Think Ahead*
- b. *Think Again*
- c. *Think Across*.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa satu konsep *Dynamic Governance* merupakan kombinasi antara budaya dengan kapabilitas yang menghasilkan perubahan dimana didasarkan pada budaya yang menunjukkan keyakinan dan nilai-nilai kelompok tertentu yang dibagi atau dimiliki bersama, sehingga dapat dianggap sebagai akumulasi pelajaran bersama dari masyarakat tertentu berdasarkan sejarah pengalaman bersama yang berwujud menjadi satu tataran nilai kehidupan.

Peraturan dan struktur pemerintahan adalah pilihan yang dibuat oleh masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan dari para pemimpinnya, hal inilah yang menempatkan bahwa dasar kepercayaan (*Trust*) menjadi tujuan dan harapan tertinggi dari pemerintah yang didapat dari masyarakatnya.

Dapat diartikan bahwa maksud berpikir ke depan adalah untuk mendorong satu lembaga dalam menilai risiko strategi dan kebijakan saat ini, me-*refresh* tujuan, dan konsep inisiatif kebijakan baru untuk mempersiapkan masa depan. Adapun dalam kerangka konseptual *Dynamic Governance* terdiri dari Budaya, Kemampuan dan perubahan, dimana ketiganya dapat dimaksimalkan ketikamampu bekerja secara interaktif dan sinergis sebagai bagian dari sistem dinamis. Kemampuan berpikir ke depan, berpikir lagi dan berpikir lintas batas juga seharusnya tidak hanya sekadar menjadi satu keterampilan yang berdiri sendiri dan tidak boleh beroperasi sebagai proses independen namun kemampuan ini terdapat hubungan yang saling berkaitan dan jika mereka terhubung secara

interdependen bekerja sebagai sebuah sistem, efek potensi mereka dapat diperkuat dan dampak keseluruhan diperkuat.

Pemerintahan yang dinamis adalah pemerintah yang bertindak progresif dan adaptif guna mewujudkan hasil yang efektif bagi daerah dan masyarakat yang dipimpinnya. Yang pasti, pemerintah harus bersikap aktif dalam membangun wilayahnya, bukan menunggu hasil laporan lapangan dan kemudian baru menentukan kebijakan.

*Dynamic governance*, Neo dan Chen (2007:1) menjelaskan, *dynamic governance is the key to success in a world undergoing accelerating globalization and unrelenting technological advancement*. Tata kelola yang dinamis mencapai relevansi dan efektivitas saat ini dan masa depan melalui kebijakan yang terus-menerus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Bila institusi/birokrasi pemerintah yang selama ini kita kenal yang menghasilkan banyak sekali masalah (Caiden, 2000) ditambah dengan peraturan yang rigid, struktur birokrasi yang besar, prosedur yang berbelit, hierarkis yang panjang, perilaku para pejabat yang korup, dan tidak mungkin institusi/birokrasi pemerintah akan berkembang secara dinamis. Sebagai contoh, ketika jabatan sudah diperjual-belikan maka akan terjadi gelombang penyalahgunaan wewenang. Modus operandi yang sederhana dilakukan oleh para pejabat akan selalu sibuk dengan urusan anggaran, luncuran anggaran untuk menutupi “modal finansial” ketika dia membeli jabatan tersebut. Dan tidak akan mempunyai waktu untuk berpikir melakukan perubahan dan hanya menerima kondisi kerja yang sudah ada. Walaupun secara teoritis dan praktis anggaran adalah menu utama institusi pemerintah (birokrasi) dapat menjalankan

tugasnya dengan baik (Pierre, 2000). Belum lagi intervensi politik yang berlebihan dalam birokrasi akan mengarah kepada eksploitasi aparatur birokrasi secara berlebihan.

Terdapatnya satu perubahan merupakan satu esensi dasar dalam pelaksanaan *dynamic governance*, karena untuk dapat menyesuaikan cara yang ditempuh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dengan dinamika perubahan lingkungan diperlukan berbagai gerakan perubahan baik mulai dari aspek perencanaan maupun pada pelaksanaannya. Pada tahap perencanaan dan tahap implementasi harus terdapat gerakan yang adaptif dengan besar kecilnya ketidakmenentuan masa depan lingkungan secara global. Perubahan itu sendiri umumnya merupakan hasil perpaduan dari dua unsur, yaitu unsur budaya (budaya organisasi pemerintah) dan unsur kemampuan (organisasi pemerintah).

Terkait dengan perubahan sebagai esensi dasar *dynamic governance*, maka elemen *dynamic governance* menurut Boon dan Geraldine (Lukman, 2017) adalah : Satu budaya organisasi pemerintah, meliputi :

a. Partisipasi

keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan desa harus dibangun dengan berorientasi pada potensi viskal, melibatkan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat

desa. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dalam meningkatkan dan mendorong munculnya sikap partisipasi, maka yang perlu dipahami oleh pengembang masyarakat adalah kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat.

b. Transparansi

Sesuatu hal yang nyata, jelas, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan keberadaannya. Dalam hal ini kata transparansi lebih ditekankan sebagai sebuah bentuk tindakan/sikap yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak atau orang lain yang berkepentingan pada sebuah hal yang mereka kerjakan. Transparansi sangat dibutuhkan dan diwajibkan untuk dilakukan di dalam institusi atau setiap lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak, hal itu perlu dilakukan sebagai bentuk pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang telah/akan diambil didalam institusi tersebut.

Beberapa contoh transparansi dan tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Transparansi keuangan
2. Transparansi Manajemen

## **B. Ruang Terbuka Hijau**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu ruang terbuka disuatu wilayah yang memiliki manfaat dan fungsi yang terkait erat dengan kelestarian dan keindahan lingkungan serta terkait dengan tingkat kesehatan, kenyamanan,

dan kesejahteraan manusia. Pada dasarnya, ruang terbuka hijau merupakan ruang yang tidak terbangun yang memiliki kekuatan untuk membentuk karakter suatu kota. RTH kota harus tetap dikembangkan demi menjaga kelangsungan hidup manusia dikota.

Ruang terbuka (*open space*) adalah bagian dari ruang yang memiliki definisi sebagai wadah yang dapat menampung aktivitas tertentu dari masyarakat suatu lingkungan yang tidak mempunyai penutup dalam bentuk fisik (Budiharjo: 2014). Teori lain menyebutkan bahwa ruang terbuka adalah ruang yang didominasi oleh lingkungan alami diluar maupun didalam kota, dalam bentuk taman, halaman, area rekreasi kota dan jalur hijau (Trancik, 2014), sehingga komunikasi antara private dan publik tercipta secara langsung.

RTH yang ideal menurut UU tentang Penataan Ruang No. 26/2007 Pasal 9 yaitu paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. RTH sangat diperlukan dalam suatu wilayah, tidak saja memberikan fungsi fisik dan arsitektural tetapi juga memberikan fungsi ekologis dan ekonomis. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) No. 1/2007 Pasal 2 dijelaskan bahwa pembentukan RTH di wilayah perkotaan:

- a. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan.
- b. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan buatan di perkotaan.
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.



Ruang Terbuka Hijau akan memberikan berbagai manfaat dan fungsi tentunya bagi kelangsungan kehidupann serta keselarasan, keseimbangan lingkungan yang berada di dalamnya. RTH dapat berfungsi secara ekologis, sosial/ budaya, arsitektural, dan ekonomi.

#### 1. Fungsi Ekologis

RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan temperatur kota. Bentuk- bentuk RTH perkotaan secara ekologis antara lain:

- a. Sabuk hijau kota
- b. Hutan kota
- c. Taman botani
- d. Sempa dan sungai

#### 2. Sosial/ Budaya

RTH sebagai ruang interaksi social, sarana rekreasi, dan sebagai tetenger kota yang berbudaya. Bentuk RTH perkotaan secara social/budaya antara lain :

- a. Taman-taman kota
- b. Lapangan olahraga
- c. Kebun raya
- d. TPU

#### 3. Arsitektural

RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, kebun-kebun bunga dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota.

#### 4. Ekonomi

RTH dapat berfungsi secara langsung seperti pengusahaan lahan-lahan kosong menjadi lahan pertanian/perkebunan dan pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan.

### C. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Secara Umum pengelolaan merupakan terjemahan dari manajemen yang mencakup beberapa kegiatan, yakni perencanaan, pengendalian, kelembagaan/pengorganisasian, sumber daya manusia, kordinasi dan pendanaan. Pelaku-pelaku atau *Stakeholders* dalam pengelolaan ruang terbuka Hijau kota adalah sebagai Berikut: pemerintah, masyarakat kota.

#### 1. Taman Kota

Taman kota merupakan sebidang lahan yang ditata sedemikian rupa, sehingga mempunyai keindahan, kenyamanan dan keamanan bagi pemiliknya atau penggunanya. Kota-kota di negara maju lebih mengutamakan taman kota untuk tujuan rekreasi dan sekaligus untuk menyegarkan kembali badan dan pikiran setelah bekerja lama dan terjadi kejenuhan. Taman kota merupakan fasilitas yang memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, dan nampaknya merupakan suatu unsur yang penting bagi kegiatan rekreasi (Arifin & Nurhayati, 2000). Taman kota pada awalnya memiliki dua fungsi utama yaitu:

- a. Memberikan kesempatan rekreasi bagi masyarakat kota, aktif maupun pasif

b. Memberikan efek visual dan psikologis yang indah dalam totalitas ruang kota.

Dalam perkembangannya, taman kota tidak lagi terbatas untuk menampung kegiatan santai dan piknik saja, tetapi harus dapat menampung kegiatan-kegiatan lain secara maksimal seperti rekreasi aktif, olah raga, kegiatan kebudayaan, hiburan dan interaksi sosial. Karenanya, suatu taman kota memiliki berbagai fungsi yakni ekologis, biologis, hidrologis, estetis, rekreasi dan sosial.

Landasan teori taman kota yang dibahas tentang: elemen-elemen taman kota, fungsi taman kota, persyaratan taman kota. Penjelasan landasan teori taman kota akan memperjelas konsep taman kota. Dengan teori taman kota ini menjadi landasan dalam pembahasan terkait dengan taman kota, untuk mempermudah evaluasi dan identifikasi taman kota.

#### a. Elemen-elemen Taman Kota

Taman (garden) diterjemahkan dari bahasa Ibrani, “gan” berarti melindungi atau mempertahankan lahan yang ada dalam suatu lingkungan berpagar “oden” berarti kesenangan, kegembiraan, dan kenyamanan. Secara lengkap dapat diartikan taman adalah sebidang lahan berpagar yang digunakan untuk mendapatkan kesenangan, kegembiraan, dan kenyamanan. Taman kota secara tradisional merupakan alun-alun dan taman raja, pamong praja yang terbuka juga untuk umum. Baru pada zaman modern dengan perancangan tata kota, taman kota merupakan tempat umum yang dikehendaki masyarakat untuk beristirahat dekat perumahan dan sebagai pengatur iklim di kampung.

Taman diartikan sebagai sebidang tanah terbuka dengan luasan tertentu di dalamnya ditanami pepohonan, perdu, semak, dan rerumputan yang dapat dikombinasikan dengan kreasi dari bahan lainnya. Taman (*Landscape*) adalah wajah dan karakter atau tapak bagian muka bumi dengan segala kehidupan dan apa saja yang ada di dalamnya, baik yang bersifat alami maupun buatan manusia, yang merupakan bagian atau total lingkungan hidup manusia beserta makhluk hidup lainnya, sejauh mata memandang, sejauh segenap indera dapat menangkap, dan sejauh imajinasi dapat membayangkan.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, dinyatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) taman kota adalah taman untuk melayani penduduk kota atau bagian dari wilayah perkotaan. Taman kota ini dapat melayani minimal 480.000 penduduk dengan standar minimal 144.000 m<sup>2</sup>. Taman kota ini merupakan lapangan hijau yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, dan olahraga dengan minimal RTH 80% - 90%. RTH taman kota dapat dimanfaatkan penduduk untuk melakukan berbagai kegiatan sosial pada satu kota atau bagian wilayah kota yang dilengkapi dengan fasilitas olahraga, taman bermain anak dan balita, fasilitas rekreasi, taman khusus lansia, taman bunga, semua fasilitas ini terbuka untuk umum.

Berdasarkan aktifitasnya taman kota dikategorikan atas 3 (tiga) macam, yaitu: taman untuk rekreatif aktif, taman untuk rekreatif pasif, dan taman untuk rekreatif pasif maupun aktif. Taman untuk rekreatif aktif Taman adalah taman yang didalamnya dibangun suatu kegiatan pemakai taman, sehingga pemakai taman secara aktif menggunakan fasilitas didalamnya, sekaligus memperoleh

kesenangan, kesegaran dan kebugaran. Contohnya adalah taman olahraga, aerobic, fitness, camping ground, taman bermain anak, taman jalur jalan, kebun binatang, danau, pemancingan, taman-taman kota dan lain sebagainya. Taman untuk rekreatif pasif adalah taman yang dibentuk agar dapat dinikmati keindahan dan kerindangannya, tanpa mengadakan aktivitas apapun, contohnya: waduk, hutan buatan, penghijauan tepi kali, jalur hijau, dan lain sebagainya. Taman untuk rekreatif pasif dan aktif adalah taman yang bisa dinikmati keindahan sekaligus ada fungsi lain dan dapat digunakan untuk mengadakan aktivitas, contohnya: taman lingkungan. Taman lingkungan adalah suatu taman yang dibuat dan merupakan bagian dari suatu permukiman.

Kategori taman umum (*public park*) menurut skala pelayanan terdiri dari 4 (empat) kategori yakni: taman nasional (*national parks*), taman pusat kota (*downtown parks*), taman lingkungan (*neighborhood parks*), taman kecil (*mini parks*). (Darmawan, 2007). Taman nasional (*national parks*) adalah taman dengan skala pelayanan taman ini adalah tingkat nasional, lokasinya berada di pusat kota. Bentuknya berupa zona ruang terbuka yang memiliki peran yang sangat penting dengan luasan melebihi taman-taman kota dan lain, dengan kegiatan yang dilaksanakan berskala nasional. Taman monumen nasional (Monas) di Jakarta merupakan taman nasional. Disamping sebagai landmark kota Jakarta juga dapat sebagai landmark nasional, terutama tugu monumen yang didukung dengan elemen asesoris kota lain seperti air mancur, jalan pedestrian yang diatur dengan pola-pola menarik, disamping taman dan penghijauan di sekitar kawasan tersebut.

Taman pusat kota (*downtown parks*) adalah taman yang berada di kawasan pusat kota, berbentuk lapangan hijau yang dikelilingi pohon-pohon peneduh atau berupa hutan kota dengan pola tradisional atau dapat pula dengan desain pengembangan baru. Areal hijau kota yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan santai dan berlokasi di kawasan perkantoran, perdagangan, atau perumahan kota. Lapangan hijau di lingkungan perumahan atau perdagangan/perkantoran di perkotaan merupakan taman pusat kota. Taman Lingkungan (*neighborhood parks*) adalah ruang terbuka yang dikembangkan di lingkungan perumahan untuk kegiatan taman seperti bermain anak-anak, olahraga dan bersantai bagi masyarakat di sekitarnya. Taman di kompleks perumahan merupakan taman lingkungan. Taman kecil (*mini parks*) adalah taman kecil yang di kelilingi oleh bangunan-bangunan, termasuk air mancur yang digunakan untuk mendukung suasana taman tersebut. Taman-taman di sudut-sudut lingkungan/setback bangunan salah satu bentuk taman kecil.

#### b. Fungsi Taman Kota

Fungsi taman kota sangat besar karena berusaha menciptakan suatu ruang yang manusiawi bagi penduduk kota. Fungsi dari taman kota terdiri dari 3 (tiga) yakni: fungsi sosial, fungsi ekologi dan fungsi estetika. Fungsi sosial dari taman kota antara lain: sebagai tempat melakukan aktifitas bersama; Sebagai tempat komunikasi bersama; sebagai tempat peralihan dan menunggu; sebagai tempat bermain dan berolahraga; sebagai sarana olahraga dan rekreasi; sarana penghubung antara tempat satu dengan tempat lainnya; pembatas diantara masa bangunan; sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi

masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan hidup; sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian, dan keindahan kota. Fungsi ekologis dari taman kota antar lain: penyegaran udara, mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro, penyerapan air hujan, pengendalian banjir dan pengaturan tata air; memelihara ekosistem tertentu dan perlindungan plasma nutfah; dan pelembut arsitektur bangunan. Fungsi keindahan tanam-taman di perkotaan dengan warna yang alami dan menarik serta tekstur yang bermacam-macam dan perencanaan yang teratur akan menampakkan keindahan. Kelebihan ini menjadikan tanaman sebagai salah satu elemen yang dapat menunjang keindahan lingkungan. Karena keindahan merupakan suatu kualitas yang sukar untuk dapat dinilai, diukur, dan ditimbang, tetapi dapat dirasakan dan merupakan suatu nilai yang unik dari dan terhadap seorang, suatu lingkungan, atau suatu karya seni.

Fungsi ekologi taman kota meliputi: sarana kesehatan, pengaturan iklim, perlindungan, pengaturan penyediaan air tanah, dan penyeimbang alam. Sarana kesehatan tanaman sebagai unsur utama penghijauan dapat mengatur serta membersihkan udara dari polutan-polutan yang ada diudara seperti karbon dioksida, timah hitam akibat dari transportasi, asap-asap industri dan lainnya. Karena pepohonan dapat mengurangi polusi, menyerap CO<sub>2</sub> dan dalam proses respirasi menghasilkan oksigen yang diperlukan manusia. Taman kota sangat berguna sekali karena unsur-unsur taman adalah tanaman, yang dalam fotosintesis akan mengeluarkan O<sub>2</sub>. Dengan bantuan sinar matahari, tanaman akan menyerap

CO<sub>2</sub> yang dihasilkan manusia dalam bernafas, dan tanaman menghasilkan O<sub>2</sub> dari proses fotosintesis yang kemudian oleh manusia melalui pernafasan.

### c. Faktor-faktor Pengaruh Pemanfaatan Taman Kota

Faktor-faktor pengaruh pemanfaatan taman kota adalah lahan taman cukup luas, memiliki penghubung hijau diantaranya (biotop interconnection) dengan pinggir alami pada jalan-jalan atau tepi sungai, dilengkapi dengan unsur pembatas dan pengarah seperti pohon peneduh, pagar hijau, aliran air, dan kolam, tonggak, jalur tepi, serta jalan setapak, perkuatan identitas dengan pemilihan jenis pohon peneduh, bentuk, warna, dan bayangan yang berdasarkan pada iklim dan budaya setempat (misalnya; tanjung, asam, gayam dan beringin), kerindangan pohon peneduh harus mampu menaungi tempat duduk, maupun jalan setapak (trotoar), kepedulian terhadap perawatan dan kebersihan serta proses perencanaan melibatkan partisipasi masyarakat karena taman kota merupakan ruang umum yang dimanfaatkan bersama menjadi tanggung jawab bersama, lokasi di kawasan pusat kota dengan bentuk berupa lapangan hijau yang dikelilingi pohon-pohon peneduh atau berupa hutan kota dengan pola tradisional atau dapat pula dengan desain pengembangan baru yang diperuntukan tempat santai (Darmawan,2007).

### c. Fungsi Taman Kota Sebagai Ruang Publik

Taman Kota sebagai ruang publik memiliki empat fungsi yaitu: fungsi sosial, fungsi ekologi, fungsi estetika, dan fungsi ekonomi. Salah satu fungsi taman kota adalah nilai estetis. Nilai estetis dari taman diperoleh dari bentuk fisik tanaman, tekstur tanaman, skala tanaman dan komposisi tanamam. Taman kota sebagai ruang terbuka mempunyai beberapa fungsi sosial. Fungsi sosial pada



taman tersebut pada akhirnya mengundang kerumunan orang untuk berdatangan yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti aktivitas pedagang kaki lima (PKL).

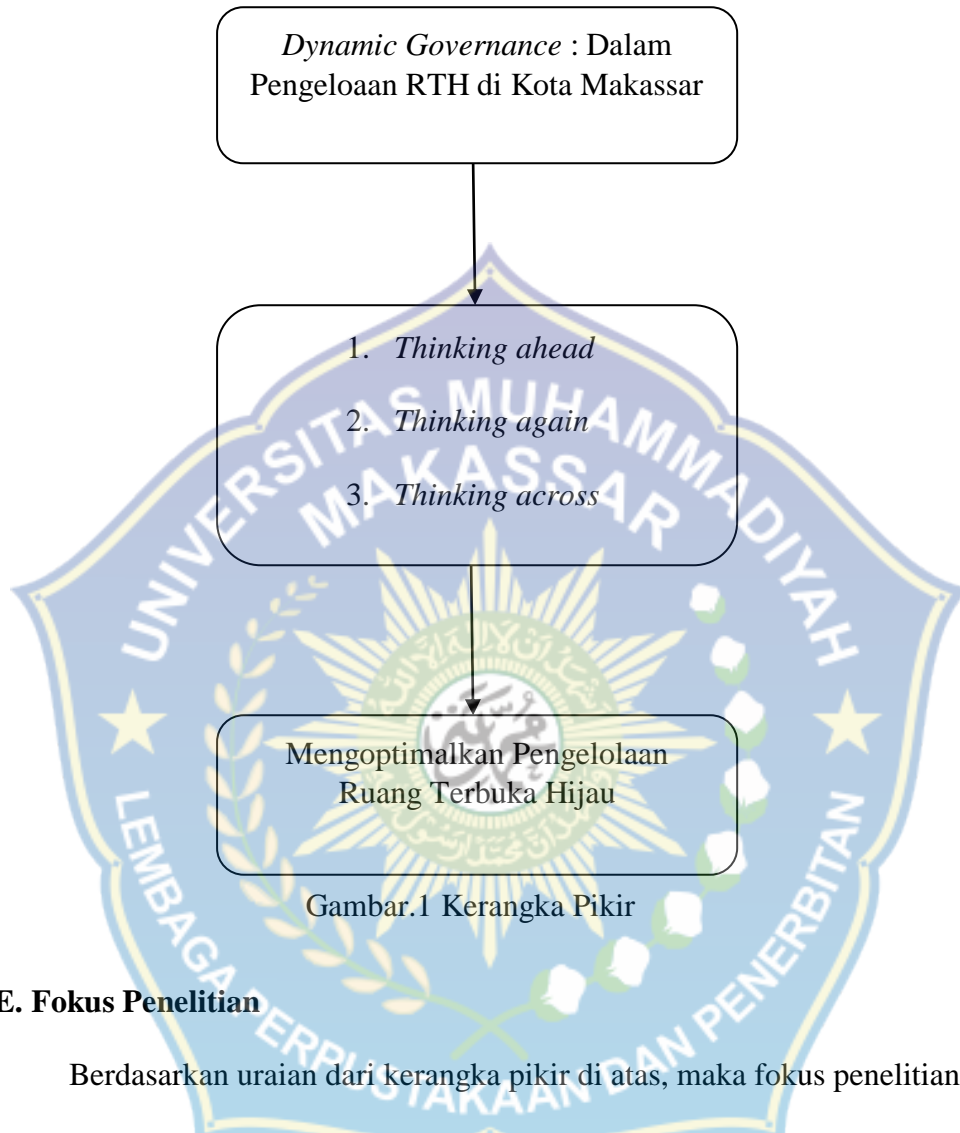
#### **D. Kerangka Pikir**

Adanya kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, sehingga ruang hijau tersebut cenderung mengalami konversi guna lahan menjadi kawasan terbangun yang dilakukan tanpa mengalami konversi guna lahan menjadi kawasan terbangun yang dilakukan tanpa memperhatikan keberadaan lingkungan sekitar. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah diatur dan ditetapkan dalam Perda, yakni Peraturan Daerah kota Makassar No. 3 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Manusia pada prinsipnya memerlukan lingkungan yang sehat di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian segala kegiatan yang terjadi di masyarakat akan selalu memperhatikan aspek lingkungan hidup atau kehidupan yang berwawasan lingkungan. Sehingga semua kegiatan yang berdampak pada berkurangnya kualitas lingkungan pada umumnya harus dikendalikan.

Terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dalam pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga masyarakat membutuhkan aturan yang lebih ketat untuk bertujuan membangun masyarakat yang berwawasan lingkungan hidup, agar dapat terjaga lingkungan.

Untuk lebih jelasnya alur pikir penelitian ini maka Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



Gambar.1 Kerangka Pikir

### **E. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian dari kerangka pikir di atas, maka fokus penelitian adalah *Dynamic governance* : dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di kota makassar dengan mengambil beberapa indikator dan fungsi agar dapat dilakukan dengan cara yang efisien.

### **F. Deskripsi Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian kerangka pikir diatas maka yang menjadi deskripsi fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. *Thinking Ahead* merupakan kemampuan mengidentifikasi faktor lingkungan yang berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan masa mendatang, memahami dampaknya terhadap sosio-ekonomi masyarakat, mengidentifikasi pilihan-pilihan investasi yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan kesempatan baru dan menghindari potensi ancaman yang dapat menghambat kemajuan masyarakat. Berfikir ke depan ini akan mendorong institusi pemerintah untuk menilai dan meninjau kembali kebijakan dan strategi sedang berjalan, memperbaharui target dan tujuan, dan menyusun konsep baru kebijakan yang dipersiapkan menyongsong masa depan.
2. *Thinking Again* merupakan kemampuan meninjau kembali berbagai kebijakan, strategi, dan program sedang berjalan. Apakah hasil yang dicapai oleh kebijakan, strategi, dan program telah memenuhi harapan banyak pihak atau perlu didesain ulang untuk mendapatkan kualitas hasil yang lebih baik. Kerangka waktu melakukan kaji ulang mulai dari kondisi yang sekarang dihadapi sampai masa waktu berlakunya kebijakan strategi dan program, dengan membandingkan apa yang dicapai dengan apa yang diinginkan. Kaji ulang dilakukan terhadap hal-hal yang sudah terjadi mencakup pemanfaatan data, informasi-informasi baru, ukuran standar yang telah dilakukan, warisan masalah dari suatu kebijakan atau program atau umpan balik yang diterima.
3. *Thinking Across* merupakan kemampuan untuk mengadopsi pikiran, pendapat, ide-ide lain diluar kerangka berpikir (*mindset*) yang

secara tradisional telah melekat dan menjadi dasar melakukan sesuatu. Dengan belajar dari pengalaman dan pemikiran orang lain dalam mengelola sebuah pemerintahan akan didapat ide-ide dan pemikiran segar dalam melakukan inovasi bagi perbaikan kebijakan, strategi, dan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan kurang lebih 2 bulan lamanya dan berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar , dengan pertimbangan perlu melakukan penelitian untuk mengetahui *dynamic governance* dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di kota makassar.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif, sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang diteliti.

##### **2. Tipe penelitian**

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif, di maksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, menginterpretasikan serta menjelaskan dengan data secara sistematis. Dasar penelitian ini adalah wawancara, yaitu melakukan dialog (wawancara) kepada informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian.

#### **C. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat di kelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

### 1. Data Primer

Data yang di dapat dari sumber pertama , data di dapat dari para informan dan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Data primer yang dibutuhkan adalah data kondisi fisik taman kota saat ini, data kunjungan ke taman kota dan pandangan pengunjung tentang taman kota, dan data pemanfaatan dari Taman Kota Makassar.

### 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber kedua, data di dapat dari data literatur, dan data instansional, yang terkait dengan relasi kuasa pengelolaan taman kota, ruang publik.

## **D. Informan Penelitian**

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang di pandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang di wawancarai di lakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil penelitian ini tidak akan digeneralisasikan ke populasi karena, pengambilan sampel tidak diambil secara random.

Informan dan narasumber penelitian ini ialah mereka Pemerintah, Pengguna Taman dalam pengelolaan Taman kota di Makassar. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan purposive, dan sebagai informan pada penelitian ini ialah:

Tabel.1 Informan penelitian

No.	Nama	Pekerjaan
1.	Novi Narilla	Pengendalian & Kemitraan RTH
2.	Irnawati	Konservasi Lingkungan
3.	Rusli Ismail	Perencanaan & Pengembangan RTH
4.	Andi Marzuki	Kasubid Perhubungan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup BAPPEDA
5.	Sujarwo	Sekretaris Camat
6.	Guntur	Pertamanan & Kebersihan
7.	Abdul Rahim	Sekretaris Bulogading
8.	Muh. Akbar	Brigade Taman
9.	Muh. Jalil	Masyarakat

### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik untuk pengumpulan data yang digunakan adalah:

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis tentang gejala-gejala yang di amati. Pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan dengan cara observasi langsung (*direct observation*) dan sebagai peneliti yang menempatkan diri sebagai pengamat (*recognized outsider*) sehingga interaksi peneliti dengan subjek penelitian bersifat terbatas. Dengan melakukan observasi, peneliti mencatat apa saja yang di lihat dan mengganti dari dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan di teliti.

## 2. Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung (tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal) kepada semua informan yang ada. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara terstruktur dengan menyiapkan bentuk-bentuk pertanyaan yang sama antar informan satu dengan informan yang lainnya.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pencatatan dokumen dan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini berfungsi sebagai bukti dari hasil wawancara di atas. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang di perlukan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini di maksud untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian. Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan hasil laporan lain yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Langkah pengolahan data adalah sebagai berikut: Data yang didapat dari observasi di kumpulkan, dan kelompokkan, selanjutnya identifikasi dan akhirnya di simpulkan berupa hasil potensi dan permasalahan. Untuk data yang di dapat dari wawancara berupa rekaman wawancara, di narasikan dan di edit supaya mendapatkan tata kalimat yang baik dan benar. Narafikasi dari hasil wawancara di analisa berdasarkan teori dan konsep yang ada, dan selanjutnya disimpulkan.



## G. Pengabsahan Data

Triangulasi bermakna yakni mengadakan pengecekan kebenaran data yang akan di kumpulkan dari berbagai sumber data, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang berbeda. Dengan itu terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data serta waktu.

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber di lakukan dengan bentuk pengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dan pengujian data yang sudah di peroleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

### 2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik di lakukan dalam bentuk pengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dalam hal ini data diperoleh dengan wawancara lalu di cek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibiitas data tersebut, menghasilkan data yang tidak sama, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memstikan data mana yang di anggap benar atau mungkin semuanya benarkarena sudut pandang yang berbeda-beda.

### 3. Triangulasi waktu

Triangulasi dengan waktu yaitu untuk menguji kredibilitas data yang di lakukan dengan cara mengecek data dengan teknik wawancara di pagi hari pada

saat narasumber masih segar, dan pada sore hari saat narasumber sudah merasa jenuh dan di penuh oleh banyak masalah. bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka di lakukan cara berulang-ulang hingga di temukan kepastian datanya.



## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada pembahasan bab ini akan menguraikan pokok persoalan yang merupakan substansi dasar penelitian mulai dari pendeskripsian gambaran umum lokasi penelitian dan selanjutnya penjabaran tentang temuan penemuan perihal *dynamic governance* dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di kota Makassar. Pembahasan hasil penelitian yang dimaksud penulis, yakni mengacu pada batasan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai parameter penelitian. Adapun rincian uraian sebagai berikut:

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Keadaan Geografis Kota Makassar

Kota Makassar (kadang dieja Macassar, Mangkasar; dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung pandang atau Ujung Pandang) adalah sebuah Kota madia dan sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, Kota Makassar terletak antara 119°24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan, yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Maros, sebelah timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai

Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 km<sup>2</sup> daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 km<sup>2</sup>.

Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Makassar, memberi penjelasan bahwa secara geografis, kota Makassar memang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien dibandingkan daerah lain. Memang selama ini kebijakan makro pemerintah yang seolah-olah menjadikan Makassar sebagai home base pengelolaan produk-produk draft kawasan Timur Indonesia, membuat Makassar kurang dikembangkan secara optimal. Padahal dengan mengembangkan Makassar, otomatis akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan Timur Indonesia dan percepatan pembangunan. Dengan demikian, dilihat dari sisi letak dan kondisi geografis - Makassar memiliki keunggulan komparatif dibanding wilayah lain di kawasan Timur Indonesia. Saat ini Kota Makassar dijadikan inti pengembangan wilayah terpadu Mamminasata.

Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 14 kecamatan, 143 kelurahan, 971 RW dan 4.789 RT. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya.

## **2. Demografi Penduduk**

Penduduk Kota Makassar tahun 2009 tercatat sebanyak 1.272.349 jiwa yang terdiri dari 610.270 laki-laki dan 662.079 perempuan. Sementara itu jumlah

penduduk Kota Makassar tahun 2008 tercatat sebanyak 1.253.656 jiwa Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin Rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar yaitu sekitar 92,17 persen, yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 92 penduduk laki-laki Penduduk kota Makassar berasal dari beberapa suku, dan suku yang signifikan jumlahnya di kota Makassar adalah suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa.

Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi di wilayah kecamatan Tamalate, yaitu sebanyak 154.464 atau sekitar 12,14 persen dari total penduduk, disusul kecamatan Rappocini sebanyak 145.090 jiwa (11,40 persen).Kecamatan Panakkukang sebanyak 136.555 jiwa (10,73 persen), dan yang terendah adalah kecamatan Ujung Pandang sebanyak 29.064 jiwa (2,28 persen).

Ditinjau dari kepadatan penduduk Kecamatan Makassar menjadi kecamatan terpadat, yaitu 33.390 jiwa per km persegi, disusul kecamatan Mariso (30.457 jiwa per km persegi), kecamatan Bontoala (29.872 jiwa per km persegi), sedang Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar 2.709 jiwa per km persegi. Kemudian, Kecamatan Tamalanrea 2.841 jiwa per km persegi), Manggala (4.163 jiwa per km persegi), Kecamatan Ujung Tanah (8.266 jiwa per km<sup>2</sup>),Kecamatan Panakkukang 8.009 jiwa per km<sup>2</sup>. Wilayah-wilayah yang kepadatan penduduknya masih rendah tersebut masih memungkinkan untuk pengembangan daerah pemukiman terutama di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala.

## **B. Gambaran Umum Keadaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar**

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup.
2. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memiliki strategi pengembangan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup kota makassar yang diarahkan pada upaya dan proses pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu terhadap unsur-unsur lingkungan hidup yang meliputi: sumber daya manusia, sumber daya hayati dan non hayati, serta sumber daya buatan untuk melestarikan lingkungan hidup yang lebih dinamis. Kebijakan umum yang berkaitan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup meliputi: upaya penataan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber-sumber daya, terutama sumber daya alam hayati dan non hayati sebagai unsur lingkungan hidup. Kebijakan tersebut meliputi:

1. Peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha tentang arti pentingnya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup bagi kehidupan manusia.

2. Peningkatan peran aktif dari semua pihak dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan guna memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.
3. Pengendalian dan pengaturan tata ruang yang mantap untuk mencegah dan menghindari penggunaan produktif dan pencegahan kerusakan lingkungan yang dapat mengganggu stabilitas ekosistem secara keseluruhan.
4. Dibentuknya Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Izin pemanfaatan, penataan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau di kota makassar.

### **1. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar**

Susunan Organisasi dinas lingkungan hidup terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Sub Bagian Program
  - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Tata dan Penataan Lingkungan (TAPEN)
  - a. Seksi Perencanaan, Pengkajian dan Analisis Dampak Lingkungan Hidup
  - b. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup
  - c. Seksi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
4. Bidang Penanggulangan dan Penanganan Sampah (P2S)

- a. Seksi Penanggulangan Sampah
  - b. Seksi Mobilisasi dan Penanganan Sampah
  - c. Seksi Pengelolaan TPA
5. Bidang Konservasi dan Pertamanan (KP)
- a. Seksi Konservasi Lingkungan Hidup
  - b. Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau
  - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
6. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kemitraan Lingkungan Hidup (P2KLH)
- a. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
  - b. Seksi Kemitraan Lingkungan Hidup
  - c. Seksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
7. UPT. Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup (UPT. IPLH)
- a. Sub Bagian Tata Usaha UPT. Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup
8. UPT. Pengolahan Sampah dan Limbah (UPT. PSL)
- a. Sub Bagian Tata Usaha UPT. Pengolahan Sampah dan Limbah
9. UPT. Laboratorium Lingkungan (UPT. LAB)
- a. Sub Bagian Tata Usaha UPT. Laboratorium Lingkungan

Pada Dinas Lingkungan Hidup memiliki beberapa bidang yang mempunyai fungsi dan kinerja masing salah satu diantaranya yaitu bidang pertamanan sebagai berikut :



Jumlah alat-alat kerja yang dipergunakan untuk kegiatan pemeliharaan bidang Pertamanan Kota Makassar sebanyak 107 alat. Fungsi alat-alat kerja tersebut untuk mendukung berlangsungnya kegiatan pemeliharaan pada seluruh taman yang dikelola Pertamanan Kota Makassar seluas 68.957 m<sup>2</sup>. Setiap alat kerja yang ada dipegang oleh para petugas taman yang sudah menjadi tugasnya sehingga kondisi ketahanan alat menjadi tanggungjawab tiap petugas. Sarana yang dibagikan 51 pada para petugas adalah alat yang sering digunakan setiap hari sedangkan untuk alat yang tidak dipergunakan sehari-hari seperti kontainer.

**Tabel 4.1**  
**Sarana penunjang pemeliharaan taman**

No.	Nama Sarana	Jumlah	Satuan
1.	Mobil Penyiram	4	Unit
2.	Dump Truck Pengangkut Sampah	3	Unit
3.	Motor Bak Tiga Roda	4	Unit
4.	Mesin Pemotong Rumput	21	Unit
5.	Alat Penggunting Dahan	6	Unit
6.	Kontainer	8	Unit
7.	Mobil Tangkasaki	12	Unit
8.	Motor Sampah	49	Unit
	<b>Jumlah</b>	<b>= 107 Unit</b>	

**Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, September 2019**

Sarana penunjang pemeliharaan taman telah disediakan oleh pemerintah yakni dinas lingkungan hidup berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Makassar. Setelah penulis melakukan penelitian pada dinas

lingkungan hidup kota makassar berikut jumlah personil bidang pertamanan yang berperan aktif pengelolaan Taman yang berada di Kota Makassar.

Guna mendukung tugas, fungsi dan kewenangannya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar perlu mendapat dukungan Sumber Daya Manusia yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan. Saat ini jumlah personel/SDM sebanyak 97 orang.

**Tabel 4.2 Personil Bidang Pertamanan**

1.	Kepala Bidang Lingkungan	1 Orang
2.	Kepala Seksi	3 Orang
3.	Pengawasan Pembinaan	1 Orang
4.	Pengawas Taman	2 Orang
5.	Staf Administrasi	6 Orang
6.	Teknisi Mesin Pemotong Rumput	1 Orang
7.	Operator Mesin Pemotong Rumput	15 Orang
8.	Petugas Pembibitan	14 Orang
9.	Petugas Penggunting/Pemangkas Taman	3 Orang
10.	Petugas Taman & Dekorasi	27 Orang
11.	Sopir Truk Sampah	3 Orang
12.	Petugas Pendukung Truk Sampah	8 Orang
13.	Operator Motor Bak Tiga Roda	4 Orang
14.	Petugas Pendukung Motor Bak Tiga Roda	4 Orang
15.	Sopir Mobil Penyiram	4 Orang
16.	Petugas Pendukung Mobil Penyiram	1 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>= 97 Orang</b>

**Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, September 2019**

Dari ruang terbuka hijau di kota makassar, kebutuhan tenaga kerja ideal pada 37 taman di kota makassar adalah 97 orang. Untuk taman yang memiliki hasil perhitungan kebutuhan tenaga kerja. Kegiatan pemeliharaan dapat digabung dengan taman yang terdekat seperti taman macan, taman pattimura, taman benteng, dll. Jumlah tenaga kerja dikarenakan penentuan jumlah tenaga kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini ditentukan penentuan jumlah tenaga kerja berdasarkan luasan taman. Semakin luas taman, maka jumlah tenaga kerja semakin banyak sedangkan rekomendasi yang diusulkan memperhatikan luasan tiap elemen penyusun taman dan kemampuan keterampilan pekerja. Sehingga semakin kompleks taman, maka jumlah tenaga kerja semakin banyak. Rekomendasi jumlah tenaga kerja ini diharapkan dapat membuat kegiatan pemeliharaan lebih efektif dan efisien.

## **2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota makassar**

### **a. Visi**

1. Mewujudkan Dinas Lingkungan Hidup yang responsif dan proaktif serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Makassar yang berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera.
2. Meningkatkan Kualitas Teknis Aparatur DLH yang didukung oleh Peningkatan Kualitas Intelektual, Mental Spritual, Keterampilan serta Sarana dan Prasarana.
3. Meningkatkan Pelayanan terhadap Masyarakat untuk mendapatkan Lingkungan Hidup yang Nyaman.

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Misi

1. Meningkatkan pengembangan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dibidang lingkungan hidup.
2. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pencemaran terhadap pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam sesuai fungsi lingkungan dalam rangka penegakan hukum lingkungan.
3. Meningkatkan upaya konservasi dan pemulihan kualitas Sumber Daya Alam terhadap kerusakan lingkungan.d.Mengembangkan teknologi dan informasi dibidang lingkungan dengan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan.
4. Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Meningkatkan pelayanan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dibidang lingkungan hidup.

c. Sasaran

1. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas sesuai peraturan perundangan dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha serta penataan regulasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Terpeliharanya kualitas sumber daya alam melalui pengendalian dan pemanfaatan sumber daya alam.

3. Meningkatnya kapasitas sumber daya lingkungan hidup dan kelembagaan serta meningkatnya akses informasi dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Meningkatnya ruangterbuka hijau melalui pengembangan dan peningkatan taman kota, jalur hijau dan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan.
5. Meningkatnya kualitas layanan kebersihan dan pengelolaan persampahan.

d. Kebijakan

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.
2. Memperbaiki mutu lingkungan hidup untuk menjamin kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.
3. Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan.

e. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan.

### **3. Profil Taman Macan**

Taman macan yang biasa juga disebut dengan Taman Segitiga Macan, terletak di sebelah selatan kantor Balaikota Makassar yang berada di titik 0 derajat. Berada di jalan Balaikota (Jalan Slamet Riyadi), Makassar, Sulawesi Selatan 90111, Indonesia mempunyai luas 11.000 (M.2) Taman ini merupakan Taman yang dikelola oleh pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana rekreasi maupun olahraga.

Taman macan yang berada di Jalan Balaikota (Jalan Slamet Riyadi) merupakan salah satu taman yang mempunyai padat pengunjung dari berbagai usia, taman ini jarang terlihat sunyi oleh pengunjung terutama pada hari libur seperti hari minggu. Masyarakat menggunakan taman ini sebagai sarana olahraga, tempat beristirahat, rekreasi. Taman macan dapat dikategorikan sebagai taman yang pengelolanya telah baik, dimana telah terlihat dengan sarana dan prasarana dalam taman, kebersihan, pengunjung yang datang, antusias masyarakat menggunakan taman sehingga dapat dikatakan sebagai taman yang dikategorikan sebagai taman pengelolaan yang baik.

#### **C. Tata Kelola Pemerintah dalam Pengelolaan Taman Macan.**

Kewajiban pemerintah kota, Dalam hal ini instansi/lembaga dinas lingkungan hidup adalah mengadakan dan menyelenggarakan pembangunan yang adil untuk peningkatan kehidupan masyarakat kota, termasuk didalamnya bidang keamanan, kenyamanan dan keselarasan. Apabila hal ini dikaitkan dengan jenis ruang terbuka hijau yang ada maka ruang terbuka hijau yang harus disediakan oleh pemerintah adalah ruang terbuka hijau koridor yang meliputi jalur hijau kota

dan jalur hijau jalan. Ruang terbuka hijau produktif yang meliputi kawasan pertanian kota, perairan/tambak. Ruang terbuka hijau konservasi yang meliputi kawasan cagar alam dan hutan kota. Ruang terbuka hijau lingkungan yang meliputi kawasan taman lingkungan dan bangunan, serta taman kota. Ruang terbuka hijau khusus meliputi kawasan pemakaman, perkantoran dan kebun binatang.

Keberadaan ruang terbuka hijau kota Makassar sangat ditentukan oleh perencanaan dan pengelolaannya. Tanggung jawab perencanaan & pengelolaan ruang terbuka hijau tersebut idealnya dilakukan bersama antara pemerintah kota, swasta dan masyarakat. Pemerintah kota makassar dalam hal ini dinas lingkungan hidup sebagai pengelola Taman Macan. Berikut beberapa aspek yang digunakan yaitu aspek partisipasi, aspek transparansi, aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia :

### **1. Partisipasi**

Partisipasi adalah proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Dalam hal ini untuk kemauan dan kemampuan berpartisipasi berasal dari dalam atau dari diri sendiri masyarakat tersebut. Artinya meskipun diberi kesempatan oleh pemerintah atanegara tetapi kalau kemauan ataupun

kemampuan tidak ada maka partisipasi tidak akan terwujud. Sedangkan kesempatan berpartisipasi berasal dari luar masyarakat. Demikian pula walaupun kemauan dan kemampuan berpartisipasi oleh masyarakat ada tetapi kalau tidak diberi kesempatan oleh pemerintah Negara maka partisipasi tidak akan terjadi. Oleh karena itu tiga hal ini tersebut kemauan, kemampuan maupun kesempatan merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan partisipasi.

Partisipasi merupakan pengambilan bagian atau keterlibatan anggota masyarakat dengan cara memberikan dukungan (tenaga, pikiran maupun materi) dan tanggung jawabnya terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama. Ada beberapa pihak yang berpartisipasi dalam pengelolaan taman macan yang berada di Kota Makassar, diantaranya pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas lingkungan hidup sebagai pengelola taman sebagai pelaksana pembangunan, penataan dan pengembangan fungsi-fungsi taman macan. Dalam pengelolaan taman macan seksi pemeliharaan taman dalam hal ini melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja seksi pembangunan taman.
- b) Penyiapan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan dan penataan Taman-Taman Kota.
- c) Melaksanakan pemeliharaan Taman Kota, pengawasan dan pengendalian tata keindahan (dekorasi) kota.

Bentuk partisipasi yang dilakukan pemerintah terhadap pengelolaan Taman Macan. Sebagai berikut hasil wawancara dengan kepala seksi pengendalian dan



kemitraan ruang terbuka hijau yang terkait tentang bagaimana cara dalam pengelolaan taman macan.

“Menurut saya pada dinas ini terbagi beberapa bidang diantaranya yaitu seksi pengelolaan dan pemeliharaan taman dimana pada bidang ini melakukan pemeliharaan taman, terbagi beberapa kelompok ada yang bekerja sama melakukan pemeliharaan taman, ada yang melakukan pengawasan terhadap pengelola yang melakukan pemeliharaan taman”( Hasil wawancara dengan NN, Pengendalian dan Kemitraan RTH kota Makassar tanggal 1 Agustus 2019).

Senada dengan ungkapan diatas perkataan Staf kecamatan ujung pandang, mengatakan bahwa:

“iya jadi tugas dinas lingkungan hidup hanya menangani penghijauan, menghitung luas-luas ruang terbuka hijau serta jalur hijau yang ada di kota makassar. jadi awal mulanya taman macan ini berada di badan lingkungan hidup kemudian berubah menjadi dinas lingkungan hidup, dulu badans lingkungan hidup ke dinas lingkungan hidup semua pemeliharaan taman itu berada di dinas lingkungan hidup, dengan adanya peraturan Perda dan Perwali keluar dinas lingkungan hidup tidak menangani lagi masalah taman jadi sejak tahun 2016 taman macan dialihkan ke kecamatan yang berada di wilayahnya masing-masing supaya lebih efektif” (Hasil wawancara dengan GN, staf kebersihan dan pertamanan di Kecamatan Ujung Pandang tanggal 5 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi pengendalian dan kemitraan ruang terbuka hijau dan staf di kecamatan ujung pandang dapat disimpulkan bahwa partisipasi pemerintah terhadap pengelolaan taman macan sehingga terwujudnya pengelolaan taman yang baik adalah pemerintah sebagai pengelola, sekaligus melakukan pengawasan agar terwujudnya tata kelola taman yang baik.

Sehubungan dengan partisipasi staf kecamatan ujung pandang mengatakan bahwa:

“ tidak ada kerjasama antara pihak swasta karena ruang terbuka hijau itu di kelola oleh kecamatan sendiri, cuma terkadang ada pihak swasta atau CSR

(*Corporate Social Responsibility*) membantu contoh seperti tempat sampah dorong''(Hasil wawancara dengan GN, staf di Kecamatan Ujung Pandang tanggal 5 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf kecamatan ujung pandang maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi pihak swasta dalam pengelolaan Taman Macan adalah pihak swasta hanya memberikan bantuan. Perusahaan pertamina tidak ada program yang berkelanjutan antara pihak pemerintah kota dan pihak swasta.

Masyarakat sebagai pengguna taman yang sering menggunakan taman yang sering menggunakan fasilitas yang ada sebagai sarana olahraga maupun sebagai tempat rekreasi. Bentuk lain dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan taman macan dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja pada pengelolaan taman. Masyarakat dapat memberikan kritik yang membangun terhadap pengelola pada taman macan dapat lebih baik.

Hasil wawancara dengan salah satu informan yang terkait partisipasi masyarakat pada pengelolaan Taman Macan satu menyatakan bahwa:

“kami hampir setiap hari melakukan aktivitas disekitar Taman ini seperti berolahraga, beristirahat, kami selaku pengguna Taman memberikan saran pada pengelola taman atau pengawas taman terhadap sarana yang masih kurang dan yang perlu dibenahi pada Taman Macan ini” (Hasil wawancara dengan MJ masyarakat pengunjung taman macan, tanggal 26 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Macan dapat disimpulkan bahwa masyarakat juga memiliki fungsi memperbaiki taman macan kearah yang lebih baik. Masyarakat pengguna taman dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah kota Makassar dalam pengawasan terhadap kinerja pengelola taman,

dalam hal ini Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, dengan cara memberikan saran atau kritik yang membangun terhadap pengelolaan Taman Macan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap partisipasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan Taman Macan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran pemerintah Kota lebih pada menyiapkan fasilitas pada Taman Macan. Pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota secara terjenjang sesuai tingkatan pemerintah dalam pemeliharaan taman.

## **2. Transparansi**

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan atau menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan referensi publik. Sehubungan dengan pengertian sebelumnya transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Berkaitan dengan penjelasan transparansi pemerintah pada pengelolaan taman macan yang berada di Kota Makassar agar terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu:

- a) Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan

- b) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan Praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Berkaitan dengan penjelasan mengenai transparansi berikut hasil wawancara dengan salah satu staf kecamatan ujung pandang yang menyatakan:

“kami di kecamatan ujung pandang khususnya dalam melakukan tugas saling terbuka antara pihak pengelola taman macan dengan pegawai tentang pengelolaan anggaran yang digunakan untuk pemeliharaan taman. kami sering melakukan pengawasan pada kinerja pengelola taman dan setiap anggaran yang di berikan kepada pengelola untuk memperbaiki fasilitas yang kurang lengkap yang berada di taman macan” (Hasil wawancara dengan GN, staf di Kecamatan Ujung Pandang tanggal 5 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu informan pada kecamatan ujung pandang tentang transparansi maka dapat disimpulkan bahwa adanya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran merupakan wujud transparansi yang dilakukan oleh pemerintah dalam kerja sama antara pihak pengelola taman macan dengan staf di kecamatan ujung pandang pada pengelolaan taman macan.

Sehubungan dengan penjelasan yang terkait dengan transparansi, berikut hasil wawancara dengan staf kecamatan ujung pandang yang menyatakan bahwa:

“Dana untuk mengelola taman dari dana yang tersedia di kecamatan ujung pandang, itu ada di DPA (Daftar Pemenuhan Anggaran) jadi, dana kurang lebih 10 juta untuk pembelian bibit baik generatif maupun vegetatif, dalam jumlah cukup dan sehat, sudah di dalam *polybag*/kantong/wadah lainnya. Realisasi fisik ini dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani oleh Tim Pengawas dan diketahui oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Kelompok.itu tertera di Daftar Pemenuhan Anggaran (DPA). Anggaran mengelola taman dalam artian mencakup keseluruhan taman-taman yang ada di kec. Ujung pandang. Meskipun disadari bahwa penambahan RTH di Kota Makassar merupakan 79 kebutuhan yang sangat penting dan mendesak” (Hasil wawancara dengan GN, staf di Kecamatan Ujung Pandang tanggal 5 Agustus 2019).

Berikut ini daftar-daftar taman dan penjabaran hasil identifikasi RTH di masing-masing taman yang di dasarkan pada data dari pengelolaan kecamatan ujung pandang kota makassar yang diolah kedalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Taman Di Kec. Ujung Pandang**

No.	Nama Taman	Alamat	Luas (m <sup>2</sup> )
1.	Taman Macan	Jl. Balaikota	11.000
2.	Taman Pattimura	Jl. Pattimura	2.350
3.	Taman Benteng	Jl. Ujung Pandang	3.160
4.	Taman Slamet Riyadi	Jl. Slamet Riyadi	1.535
5.	Taman Rumah Jabatan Walikota	Jl. Ujung Pandang	1.700
6.	Taman Hasanuddin	Jl. Sultan Hasanuddin	6.510
7.	Taman Karunrung	Jl. Arief Rate	3.430
8.	Taman Monumen Korban 4.000 Jiwa	Jl. Korban 4.000 Jiwa	4.610
9.	Taman Pualam	Jl. Somba Opu	960
10.	Taman Kantor Balaikota	Jl. Jend. Ahmad Yani	7.990

**Sumber : Kecamatan Ujung pandang, September 2019**

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada sekitar 10 taman yang dikelola oleh kecamatan ujung pandang kota makassar yang memiliki luas terbuka hijau 6% apabila dihitung dari jumlah RTH dari persentase untuk nilai rata-rata luasan RTH dari wilayah kecamatan.

Secara kuantitatif , luasan RTH di Kota Makassar masih jauh dari yang diharapkan, banyaknya tantangan yang dihadapi pemerintah dalam merealisasikan jumlah RTH minimum memerlukan strategi khusus dan ketegasan dari Pemerintah Kota Makassar. Namun dari hasil perbandingan data luasan RTH dari tahun 2015 dan tahun 2019 ditemukan kenaikan persentase luas RTH yang cukup signifikan sebesar 1% atau sebesar 199,26 Ha dari luas wilayah Kota Makassar.

Meski pertambahan jumlah hanya sekitar 1% namun jumlah 199,26 Ha merupakan pencapaian yang luar biasa mengingat kebutuhan ruang dalam pembangunan infrastruktur di Kota Makassar ini semakin hari semakin meningkat.

Dari data diatas dapat pula diketahui taman yang memiliki luasan RTH yang paling tinggi adalah Taman Macan yang memiliki luas 11.000 Ha RTH dengan persentase 2,242% dan taman yang memiliki luasan RTH yang paling rendah adalah Taman Pualam dengan luas 960 Ha RTH dengan persentase 0,011%.

Sehubungan dengan penjelasan yang terkait dengan transparansi, berikut hasil wawancara dengan salah satu informan masyarakat yang berkunjung di Taman Macan yang menyatakan bahwa :

“Kami melihat Berbagai tingkatan, remaja, para pegawai, maupun lanjut usia memenuhi taman sambil jalan kaki, ada juga ibu rumah tangga yang membawa serta anaknya dengan memakai sepeda mini, Taman Macan adalah salah satu *space publik* yang menjadi dambaan warga kota Makassar untuk berolah raga” (Hasil wawancara dengan MJ masyarakat pengunjung taman macan, tanggal 26 Agustus 2019).

Berkaitan dengan penjelasan mengenai transparansi berikut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang berkunjung ke Taman Macan, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah merasa puas dengan fasilitas yang berada di

Taman Macan. Taman Macan telah menjadi sarana untuk berolahraga bagi masyarakat sekitar Taman Macan, merupakan salah satu bukti keberhasilan transparansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan taman macan sehingga pengunjung merasa puas dan nyaman melakukan aktivitas disekitar taman macan.

Berdasarkan observasi peneliti, transparansi yang dilakukan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan Taman Macan maka dapat disimpulkan bahwa telah diterapkan dengan baik.

### **3. Kelembagaan**

Dalam merancang, mengembangkan dan pengelolaan RTH Kota, diperlukan institusi yang professional, yaitu instansi di pemerintahan perkotaan. Lembaga sebagai tenaga pelaksanaan atau dinas ini akan terlibat langsung dalam menata ruang terbuka, sehingga lembaga ini harus diwujudkan menjadi suatu lembaga yang kuat, yang dapat memikirkan dan mengkoordinasikan penghijauan kota.

Pelaksanaan dalam pengelolaan RTH Kota sangat dibutuhkan kelembagaan yang professional di bidang penghijauan kota, karena penghijauan kota menyangkut desain tanam, studi pengembangan RTH, pelaksanaan program dan proyek pemeliharaan/pengelolaan pertanaman, penyediaan bermacam bibit yang sesuai dengan kondisi daerah, dan usaha penyuluhan serta bimbingan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya tugas ini dibutuhkan adanya kerjasama yang efektif baik dengan lembaga-lembaga terkait maupun pihak swasta dan masyarakat. Institusi yang berwenang dalam pemeliharaan RTH Kota terutama adalah pemerintah, selain itu yang berperan dalam pemeliharaan adalah pihak swasta, masyarakat, lembaga dan kerjasama dari ketiga dengan pemerintah.

Berdasarkan dengan penjelasan tentang kelembagaan berikut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat mengenai pengelolaan taman macan bahwa:

“kalau soal memikirkan dan mengkoordinasikan penghijauan kota sudah bagus pengerjaannya, ruang terbuka hijau sudah tertata dengan baik tetapi hanya sedikit kelembagaan yang professional di bidang penghijauan kota karena banyak pegawai/staf yang kembali ke jabatan sebelumnya jadi tidak lagi dibidang RTH”( Hasil wawancara dengan NN, Pengendalian dan Kemitraan RTH kota Makassar tanggal 1 Agustus 2019).

Sehubungan dengan penjelasan yang terkait dengan pengelolaan, berikut hasil wawancara dengan salah satu informan masyarakat yang berkunjung di Taman Macan yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal pengelolaan sering diupayakan oleh kami akan tetapi upaya pengelolaan tersebut masih terkendala oleh berbagai persoalan seperti kurangnya kesadaran sebagian masyarakat tentang pentingnya ruang terbuka hijau dan sebagian masyarakat kurang memiliki sikap rasa untuk memiliki dalam menjaga keberlangsungan pelestarian ruang terbuka hijau disamping itu masih adanya rasa apatisme”(Hasil wawancara dengan MJ masyarakat pengunjung taman macan, tanggal 26 Agustus 2019).

Lebih lanjut, penjelasan staf di kecamatan terkait dengan pengelolaan taman macan, berikut hasil wawancara informan mengungkapkan bahwa:

“Betul yang dikatakan bahwa kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dari ruang terbuka hijau karena kami juga baru mengerjakan hal seperti ini semenjak dinas lingkungan hidup limpahkan pengelolaan taman ke kecamatan berdasarkan wilayahnya masing-masing. Nah, salah satunya adalah taman macan”(Hasil wawancara dengan GN, staf di Kecamatan Ujung Pandang tanggal 5 Agustus 2019).

Dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat dan salah satu staf kebersihan dan pertamanan di kec. Ujung pandang, maka dapat disimpulkan bahwa kepala kecamatan harus melakukan pendekatan kepada masyarakat dan mensosialisasikan pentingnya bekerja sama dengan masyarakat, bukan hanya



masyarakat tetapi LSM (lembaga swadaya masyarakat) juga harus berperan dalam pemeliharaan RTH (ruang terbuka hijau) yang ada di kota makassar salah satunya taman macan karena berada dekat dengan wilayahnya.

#### **4. Sumber Daya Manusia**

Pada saat ini tenaga kerja biasa juga dikenal dengan istilah Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia memiliki posisi yang sangat strategis dalam organisasi, artinya unsur manusia memegang peranan penting dalam melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan. Eksistensi sumber daya manusia itulah yang terdapat dalam organisasi yang kuat. Mencapai kondisi yang diharapkan diperlukan adanya manajemen terhadap sumber daya manusia secara memadai sehingga terciptalah sumber daya manusia yang berkualitas, loyal dan berprestasi.

Sumber daya manusia adalah orang-orang yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan RTH. Sumber daya manusia dapat berasal dari unsur pemerintahan dan masyarakat umum serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan atau individu yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang sumber daya manusia berikut hasil wawancara dengan staf kecamatan kec. Ujung pandang:

“Jadi waktu dinas lingkungan hidup mengalihkan taman ke kecamatan kita untuk dikelola, kita langsung membentuk yang namanya Brigade Taman sejumlah 30 personil untuk pengelolaan taman secara teknis dan operasional tugasnya dari pagi sampai sore memelihara dan menjaga taman”(Hasil wawancara dengan GN, staf di Kecamatan Ujung Pandang tanggal 5 Agustus 2019).

Berikut sumber daya manusia yang disiapkan oleh kecamatan untuk pengelolaan taman di kec. ujung pandang:

**Tabel 4.4 Pengelola Taman**

No.	Pengelola	Jumlah
1.	Fukuda	20
2.	Brigade Taman	30
3.	PRC (Pasukan Reaksi Cepat)	15

**Sumber: Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, 2019**

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, menyerahkan secara penuh pengelolaan taman dan Brigade Taman yang ada di Kota Makassar, kepada 13 kecamatan. Salah satunya kecamatan ujung pandang mengelola 10 taman di kota makassar, jadi di setiap taman kepala kecamatan menugaskan 4 atau 5 orang brigade taman untuk menyiram tanaman, menjaga dan memelihara taman. Sedangkan jadwal petugas Brigade Taman, dikerjakan sejak pagi hingga sore hari. Adapun yang disiapkan oleh kecamatan yaitu fukuda motor 3 roda untuk mengangkut dan mengambil sampah yang ada di taman. Fukuda dengan PRC (pasukan reaksi cepat) hampir sama dengan pekerjaan yang dilakukan, satpol pp juga bertugas

Lebih lanjut, penjelasan brigade taman di kecamatan ujung pandang terkait dengan pengelolaan taman macan yang selama ini bekerja sebagai brigade taman pada saat dinas pertamanan dan kebersihan masih ada waktu itu, berikut hasil wawancara informan mengungkapkan bahwa:

“jadi kami sudah lama bekerja menjadi tukang bersih-bersih taman semenjak dinas pertamanan dan kebersihan yang mengelola taman ini tetapi

sekarang bukan lagi, karena sudah dialihkan pengelolaan taman ini kekecamatan. Jadi sebelumnya kami ini berkerja memelihara dan menjaga taman kami dulu ada sekitar 10 orang yang bertugas di satu taman tetapi sejak dikelola oleh kecamatan kami sekarang tinggal 4 orang yang bertugas di satu taman jadi disetiap taman 4 atau 5 orang yang bertugas mengelola taman”(Hasil wawancara dengan MA, Brigade Taman Kecamatan Ujung Pandang tanggal 5 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara staf kecamatan dengan brigade taman dapat disimpulkan bahwa perlu diperhatikan lagi seputar sumber daya manusia dalam pengelolaan taman ini karena Brigade Taman yang ada di taman macan merasa kualahan dalam membersihkan taman karena taman ini termasuk luas, pohonnya juga banyak, otomatis sampah tiap hari banyak sekali sedangkan kami hanya berempat/4 orang menjaga kebersihan di taman ini ditambah lagi gajinya brigade taman sudah tidak sama ketika dikontrak dengan dinas pertamanan dan kebersihan dulu.

#### **D. *Dynamic Governance* Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau**

##### **1. *Thinking Ahead***

wawancara dengan Sekretaris Camat menyatakan bahwa kondisi Kota Makassar sudah tercemar baik oleh limbah baik padat maupun cair. Hal tersebut disebabkan kesalahan dalam hal perencanaan, penataan dan pengawasan, hal ini terungkap dalam hasil wawancara dengan responden, sebagaimana yang terungkap sebagai berikut:

“Kita menyadari bahwa perencanaan terhadap Kota Makassar sudah dilakukan namun dalam kenyataanya masih terjadi dan terus terjadi pencemaran perairan Kota Makassar, untuk itu kedepan kita harus bersama-sama melaksanakan pengelolaan terhadap ruang terbuka hijau di kota makassar”

Peran pemerintah dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan Kota Makassar merupakan unsur penting yang memiliki peran penting meskipun berbagai kendala dan permasalahan, sesuai dengan yang disampaikan Pengendalian & Kemitraan RTH sebagai berikut:

“Ada upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah meskipun belum maksimal, karena masih terjadi benturan kepentingan antara pemukiman warga (sosial) dengan kepentingan lingkungan hidup. Selain itu tidak tegasnya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan/kegiatan usaha di sekitar kawasan pesisir yang mencemari pantai/laut. Pemberian sanksi tegas kepada kegiatan/usaha yang mencemari lingkungan (pantai) selain upaya preventif yang lebih utama melalui sosialisasi dan edukasi secara terus menerus kepada masyarakat di sekitar kawasan pesisir tentang pentingnya memelihara dan melestarikan lingkungan (khususnya wilayah kota Makassar’”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah yaitu dalam bentuk sosialisasi terhadap pencemaran lingkungan yang mengedepankan Pentingnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan hidup membutuhkan perpaduan dengan seluruh stakeholder dan masyarakat untuk bekerjasama dalam mengelola lingkungan. Salah satu bentuk pencemaran lingkungan diakibatkan oleh limbah (Bahan berbahaya dan beracun). Khusus untuk kebijakan pada Lahan Terbuka Hijau menelisik pada kebijakan Kepmendagri No. 01/2007, tentang penyediaan pemanfaatan ruang terbuka hijau wilayah kota (RTHKP).

Pengelolaan hutan kota dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Tata dan kelola yang dilakukan mulai dari tahap pelestarian sampai kepada tahap perawatan yang berkesinambungan. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah sebagai peran yang dimaksimalkan merupakan hal urgen yang

biasanya dilakukan dan dikerjakan secara rutin seperti penyalahgunaan hutan oleh pihak yang bertanggung jawab dan hal lainnya pula.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seksi konservasi lingkungan :

“kita memiliki taman dan hutan kota yang cukup dan terawat, baik dari segi cagar alam dan satwa yang berada di hutan kota tersebut. Pengelolaan taman dan hutan kota dilakukan dari pihak dinas kehutanan sendiri melalui pendampingan dan pengecekan rutin terhadap taman dan hutan kota yang tersedia. Wujud dari pengelolaan yang dilakukan diharapkan agar masyarakat bisa turut andil untuk merawat. Sehingga tujuan utama adanya taman dan hutan kota ini bisa tercapai”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kebijakan pemanfaatan lahan terbuka hijau wilayah kota (RTHKP) mengharuskan setiap kota memiliki lahan terbuka hijau seperti taman perkotaan dan hutan kota minimal 30 persen. Namun hal ini belum dapat terpenuhi oleh kota manapun di Indonesia termasuk Makassar. Selain itu implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, merupakan bentuk antisipasi pemerintah dengan tujuan merumuskan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan yang menjadi acuan dalam berbagai kebijakan dan kegiatan pengelolaan ruang terutama pengelolaan ruang terbuka termasuk ruang publik di Kota Makassar.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Berikut adalah wawancara kepada Perencanaan & Pengembangan RTH :

“Berdasarkan dari hasil analisis, maka rencana kebutuhan lahan untuk RTH di Kota Makassar adalah 30% dari luas wilayah, dimana 20% diperuntukkan untuk RTH Publik dan Privat, Sedangkan 10% diperuntukkan untuk RTH hutan kota sebagai kawasan lindung”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terkait rencana kebutuhan lahan RTH maka dalam perencanaan kebutuhan lahan pemerintah kota makassar akan membentuk tim analisis dalam memperoleh data mengenai lahan yang akan ditinjau langsung oleh tim tersebut.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kasubid Perhubungan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup BAPPEDA Kota Makassar :

“pengelolaan ruang terbuka hijau public di Kabupaten Majene bersifat Swakelola sehingga menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi masing-masing jenis ruang terbuka hijau”.

Berikut pula penjelasan mengenai bagaimana pengembangan kedepan, ini dijelaskan oleh Pengendalian & Kemitraan RTH Kota Makassar:

“konsep rencana pengembangan kawasan ruang terbuka hijau sudah ada dan untuk menjadi pedoman pelaksanaan sampai 2030 kedepan. Menjadi harapan bahwa perencanaan ini dapat dimaksimalkan kepada pihak teknis maupun tim lapangan untuk melaksanakan ini. Biasanya terkait konsep apapun itu seperti halnya pengembangan ruang terbuka ini selalu dirapatkan kepada kedinasan atau badan terkait untuk pemenuhannya”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa pemahaman pencapaian tujuan belum dapat dikatakan dapat dipahami secara menyeluruh karena masih terbendung oleh arus urbanisasi perkembangan perkotaan seperti pembangunan perumahan dan ruko-ruko belum lagi konvensi wilayah resapan air banyak terjadi yang disebabkan oleh sejumlah pembangunan. Selain itu

pemenuhan RTH sejumlah 30 Persen yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 masih belum dapat terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa opsi strategi yang dapat dimunculkan yaitu pemanfaatan ruang-ruang terbangun dengan cara melakukan penanaman pada atap dan tembok bangunan selain itu strategi dari segi kebijakan dapat ditempuh dengan mendorong penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah terkait dengan RTH dan Rencana Induk RTH agar perencanaan pembangunan RTH memiliki kekuatan hukum melalui peran DPRD.

## **2. *Thinking Again* (Berpikir Lagi)**

Dalam program Perencanaan Pembangunan Jalur Hijau ini yang banyak berkoordinasi dan bekerjasama adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Dinas Lingkungan Hidup menjadi pelopor pembangunan fisik dari jalur pejalan kaki berupa trotoar dan pembangunan fisik lainnya. Sedangkan pihak pertamanan, dalam hal ini Bidang penghijauan melengkapi pembangunan jalur tersebut dengan penanaman sejumlah pohon dan penataan bunga disepanjang jalur pejalan kaki tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Konservasi Lingkungan Kota Makassar.

“Akan ada sepuluh titik yang akan dibuatkan jalur hijau. Yang pertama adalah Jalan Haji Bau, Jalan Penghibur, Jalan Nusantara, Jalan Ahmad Yani, Jalan Jend. Sudirman, Jalan Pasar Ikan, Jalan Ujung Pandang, Jalan Boulevard, jalan landak dan pengayoman. Dalam pembangunannya nanti Untuk pedestrian adalah tanggungjawab DLH, istilahnya tugas dari DPK bagaimana menyediakan lahan hijau disekitar pedestrian.”(Wawancara Dengan Irnawati Konservasi Lingkungan Kota Makassar)

Diwawancarai ditempat berbeda, Rusli selaku Kepala Perencanaan & Pengembangan RTH DLH menyatakan untuk tahun ini pihaknya memang

merencanakan untuk membuat jalur pejalan kaki. Jalur ini nantinya akan dijadikan sebagai jalur hijau.

“Koordinasi dengan pihak pertamanan lebih kepada pembagian tugas antara pembangunan trotoar dan penanaman pohon dan estetika lingkungannya, jadi pihak DLH bertanggung jawab terhadap infrastruktur seperti trotoar dan lampu sedangkan pihak pertamanan lebih kepada perencanaan lingkungan baik itu pohon dan bunganya.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa hasil tinjauan yang dilakukan pemerintah kota masih kesulitan dalam memenuhi target RTH dimana kota Makassar masih dibawah 10 % dari 30 % persyaratan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Peninjauan dilakukan dengan memaksimalkan pendataan dan mengupdate kembali ruang terbuka hijau yang ada di Kota Makassar yang menggunakan teknologi dari satelit selain itu juga mendapat klarifikasi langsung dari kelurahan mengenai area lingkungan terbuka hijau yang ada di Kota Makassar. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa mendesain ulang kebijakan dan program RTH dapat dilakukan pemerintah secara sinergis dengan tidak terlepas dari strategi pengelolaan lingkungan hidup terpadu lainnya yang difokuskan pada empat aspek pengelolaan, yaitu permasalahan sampah, RTH, kualitas air, dan fasilitas umum lain yang terkait erat.

Penggunaan lahan industri seluas 44,40 Ha, lahan ini dijadikan pusat perdagangan tradisional seperti pasar, pusat perdagangan barang, kawasan pembangkit, dan kawasan depo bahan bakar dan minyak. Lahan ini menyebar di dua kecamatan yaitu Kecamatan jung Pandang.



Seperti yang dikatakan oleh bapak Sujarwo terkait pemanfaatan lahan yang ada di Kecamatan Ujung Pandang, beliau mengatakan bahwa :

Kecamatan Ujung Pandang diperuntukkan sebagai kawasan industri dan bisnis seperti pasar, pusat pertokoan, pusat pelelangan ikan dan hasil laut dan lain sebagainya. Dan Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan terpadat yang ada di Kota Makassar karena mempunyai jumlah pertumbuhan penduduk yang cukup padat yang mengakibatkan kecamatan ini pula menjadi pusat kota yang mempunyai aktifitas yang cukup padat disbanding kecamatan-kecamatan lainnya di Kota Makassar.”

Pemanfaatan lahan taman di Kota Makassar dikembangkan di daerah pusat kota dengan luas 26,34 Ha, karena taman kota tidak memerlukan lahan yang luas dalam perkembangannya. Taman kota pada umumnya terdiri dari jenis vegetasi yang tidak terlalu besar dan diselingi oleh tanaman rumput disekelilingnya. Selain itu, sebagai sumber penyedia oksigen dan meningkatkan kenyamanan, tanaman kota dapat juga dijadikan sebagai tempat rekreasi keluarga.

Hal serupa pula disampaikan oleh ibu Novi Pengendalian & Kemitraan RTH Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, beliau mengatakan bahwa :

“Pemanfaatan Lahan yang telah dilakukan pada tahun 2016 Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan penanaman penghijau di sepanjang jalan-jalan protokol dan taman-taman kota, daerah aliran sungai, dan sumber mata air. Dari penanaman tersebut dampak yang telah diterima ialah sudah banyak terlihat penghijauan di daerah yang telah ditanami pohon-pohon pada 2016 kemarin. Sedangkan, dengan perusahaan ( pihak swasta ) telah dilakukan pola kerjasama dengan membangun taman-taman kota di areal Ruang Terbuka Hijau”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa system baru yang dapat dilakukan di Kota Makassar dengan mengadakan strategi vertical garden yang dapat meningkatkan fungsi RTH namun tidak menambah luasan RTH namun strategi baru yang perlu dipotimalkan adalah menyediakan lahan terbuka hijau pada lahan masyarakat yakni sejumlah 10 %. Selain mendukung system

Vertikal tersebut juga perlu difollow up dengan peneningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan lahan terbuka hijau. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa system vertical dalam optimalisasi lahan terbuka hijau perlu didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dengan mengkontribusikan sebanyak 10% lahan mereka untuk lahan terbuka hijau disamping itu dorongan berupa pemerdayaan komunitas hijau sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam optimalisasi lahan terbuka perlu diperkuat oleh pemerintah kota.

### **3. *Thinking Across* (Berpikir Lintas Batas)**

Keberhasilan implementasi kebijakan publik mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Program mengenai Lorong Garden yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Makassar adalah program yang harus disampaikan kepada warga melalui pihak kelurahan. Disisi lain dari pemahaman aparat kelurahan tentang program tersebut perlu dikuasai agar aparat kelurahan dapat menjelaskan apa tujuan dari program Lorong Garden tersebut. Program yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Makassar, langsung disampaikan keseluruh SKPD yang ada dikota makassar untuk dijalankan, namun penyampaian program ini tidak disertai dengan dokumen tata cara pelaksanaan program, yang diterima oleh SKPD khususnya kelurahan

hanyalah garis besar mengenai program tersebut. Jumlah aparat kelurahan juga memegang peranan penting dalam menjalankan program ini dengan kerjasama intansi terkait dalam mensukseskan program lorong garden inisehingga Implementasi kebijakan Lorong Garden di Kelurahan Baru akan berjalan dengan baik jika salah satu variabel keberhasilan kebijakan yaitu komunikasi antara pemerintah dan kelompok sasaran itu tepat dan merata. Seperti yang dikemukakan Bapak Abdul Rahim sebagai Sekretaris Kelurahan Bulogading :

“Program Lorong Garden ini kami sebenarnya sudah komunikasikan bersama beberapa staff SKPD sejawaran dan beberapa tokoh masyarakat tentang program pemerintah ini, Cuma memang pendistribusian informasi secara langsung ke lorong-lorong masih belum merata khususnya di kelurahan Bulogading.”

Indikator keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah itu dilihat bagaimana proses penyampaian informasi kepada masyarakat itu jelas dan dimengerti masyarakat. Persyaratan ini menggariskan bahwa harus ada komunikasi , koordinasi dan transparansi anggaran yang sempurna diantara berbagai unsur dan badan yang terlibat dalam program.

Komunikasi memang memainkan peran penting bagi berlangsungnya koordinasi dan implementasi pada umumnya. Namun, komunikasi yang benar-benar sempurna sebetulnya merupakan kondisi yang sulit bisa diwujudkan. Walaupun sistem informasi manajemen mungkin dapat membantu dalam memadukan arus informasi yang diperlukan, informasi ini belum bisa menjamin bahwa data, saran dan perintah-perintah yang dihasilkan benar-benar dimengerti sebagai apa yang dikehendaki oleh pihak yang mengirimnya.

Sebagaimana hal senada yang diungkapkan Bapak Abdul Rahim sekretaris

Kelurahan Bulogading :

“Sebenarnya kami sudah menyampaikan kepada seluruh RT/RW yang ada dikelurahan Bulogading ini sebagai perpanjangan tangan kami tentang program Lorong Garden, sisa bagaimana tugas RT/RW memberikan arahan kepada masyarakat sekitar bagaimana menjelaskan program walikota ini, Namun memang kami tidak semena-mena memasang Lorong Garden disetiap lorong karena perlu uji kecocokan lahan, bibit dan sebagainya untuk program ini”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa evaluasi yang perlu diperkuat adalah komitmen bersama untuk menambah luas lahan agar mencapai 30 % luas lahan terbuka hijau kota selain itu perlunya peningkatan peran pemerintah, swasta dan masyarakat yang sinergis untuk mengoptimal Lahan Terbuka Hijau Kota Makassar. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa indikator penyesuaian menunjukkan perlunya sosialisasi pada publik mengenai pentingnya menjaga keseimbangan dan keberlangsungan lingkungan kota melakukan inventarisasi wilayah-wilayah yang termasuk sebagai Ruang Terbuka Hijau serta melakukan penegakan hukum disamping itu penyesuaian juga perlu mempertimbangkan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat melalui serangkaian program seperti program Lorong garden (Longgar) yang sekiranya dapat memberikan kontribusi pada optimalisasi RTH Kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa indikator adopsi dapat dilakukan dengan mengikuti pola yang digambarkan oleh Negara lain seperti di Amerika dan Jepang dimana RTH dibangun melalui ijin sebagai bagian karya pembangunan dalam artian ada aturan pembatasan perencanaan kota, istilahnya *sub-division control* yakni Metode menyisihkan lahan untuk RTH didasarkan

pada kriteria dengan skala dan tipe karya pembangunan tertentu sesuai yang dikehendaki, sekaligus merupakan kondisi penting agar usulan pembangunan disetujui hal ini berlaku di Amerika dan di Jepang juga sangat mempertimbangkan struktur bangunan di dalamnya yang memerlukan proyeksi sebuah area kosong dan terbuka untuk umum merupakan contoh yang patut untuk ditiru atau di adopsi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Makassar diharuskan memiliki kemampuan untuk berbuat dan melaksanakan *dynamic governance* dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, hal ini terutama ditujukan menuju penguatan “Kota Makassar sebagai pemerintahan daerah kelas dunia”
2. Kapabilitas *Dynamic Governance* yang ditunjukkan dalam penelitian ini mengungkap bahwa adanya antisipasi RTH melalui kebijakan, pemahaman pencapaian tujuan belum dapat dikatakan dapat dipahami secara menyeluruh namun opsi strategi yang dapat dimunculkan dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan ruang-ruang terbangun dengan cara melakukan penanaman pada atap dan tembok bangunan selain itu strategi dari segi kebijakan dapat ditempuh dengan mendorong penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah terkait dengan RTH. Selanjutnya peninjauan kebijakan dapat dilakukan dengan memaksimalkan pendataan dan mengupdate kembali ruang terbuka hijau yang ada di Kota Makassar selain itu desain kebijakan tidak terlepas dari strategi pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu termasuk didalamnya *vertical system* yang perlu didukung oleh partisipasi aktif masyarakat serta sinergitas antara pemerintah dan masyarakat melalui serangkaian program penghijauan yang memberikan

kontribusi pada optimalisasi Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Makassar agar sekiranya mampu memaksimal pemenuhan persentasi RTH sesuai kebijakan pemerintah.

## **B. Saran**

Dengan memperhatikan kesimpulan diatas dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis merasa perlu memberikan masukan sebagai berikut:

1. Perlu ada kerjasama terpadu antar berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, instansi/departemen terkait) dalam pemanfaatan fungsi tata ruang demi keserasian, keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
2. Perlu ada kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengawasi pemanfaatan tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup, dan Perlu ada ketegasan dari pemerintah dalam menindak para perusak bukit dan lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Rozan. 2009. *Pengembangan Model tentang Pengaruh Able People dan Agile Process terhadap Dynamic Capabilities dalam Proses Kebijakan Publik (Studi Kasus Pelayanan Bidang Pendidikan di Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali)*. (Disertasi) Fisip Ilmu Administrasi. Depok : Universitas Indonesia.
- Arifin, dan Nurhayati. 2000. *Pemeliharaan Taman*. Jakarta: Penebar Swadaya
- Budiharjo, 2014, Kota Yang Berkelanjutan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Boon Siong Neo, Geraldine Chen. 2007. *Dynamic Governance, Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore*. World Scientific Publishing Co. Pte.
- Caiden, Gerald, 2000. *The Essence of Public Service Professionalism; On Promoting Ethics in the Public Service*, United Nations, New York.
- Darmawan, 2007. *Peranan Ruang Publik Dalam Perancangan Kota*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamrun dan A.I.Prianto. *Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar*. Jurnal Ilmu Pemerintahan FISIP UNIKOMS
- Joga, Nirwono. 2011. *RTH30% Resolusi (Kota) Hijau*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka -----, 2013. *Gerakan Kota Hijau*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Lukman, Munawar, Fauzi. 2017. *Strategi Dynamic Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani.
- Muchlas, Zulfan. 2017. *Kapabilitas Dynamic Governance Dalam Optimalisasi Pengelolaan Lahan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar*. Jurnal Ilmu Pemerintahan CosmoGov, Vol.3 No.1.
- Neo, B.S. & Chen, G. (2007). *Dynamic governance: Embedding culture, capabilities and change in Singapore*. Singapore: World Scientific Publishing.
- Pierre, J& Peters, BG (2000) *Governance, Politics and The State*. New York: St. Martin's Press.
- Trancik, 2014. *Finding Lost space, Theories of Urban Design*. New York : Van Nostrand Reinhold Co.



**Peraturan**

Perda Kota Makassar No. 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Undang Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Peraturan Walikota Makassar No. 69 Tahun 2016 Tentang Izin Pemanfaatan, Penataan, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar



# Lampiran











**RIWAYAT HIDUP**

**NINING DEWI ASTUTI**, Lahir di Sungguminasa pada Tanggal 25 April 1997. Anak Kedua dari pasangan Muh. Natsir N dan Nurhayati. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Inpres Maccini Ayo pada tahun 2008. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMPN. 3 Sungguminasa dan tamat pada tahun 2011.

Kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN.3 Sungguminasa dan tamat pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2019 ini akan mengantarkan penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul "*Dynamic Governance : Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar*"

